

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Berakhirnya Perang Dingin mengakibatkan terjadinya pergeseran isu-isu dalam hubungan internasional, dari isu yang berhubungan dengan politik dan keamanan menjadi lebih dinamis dengan adanya isu terorisme, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dsb. Isu mengenai lingkungan hidup akhir-akhir ini menjadi salah satu isu yang sering diperbincangkan dikalangan masyarakat maupun dalam berbagai media, baik secara perorangan maupun negara. Hal tersebut berkaitan dengan maraknya fenomena lingkungan seperti pemanasan global (*global warming*)¹ yang semakin mengkhawatirkan. Peningkatan laju perusakan hutan menjadi salah satu gejala yang memicu timbulnya efek rumah kaca, yang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pemanasan global.²

Peningkatan suhu bumi berpengaruh terhadap iklim yang cukup signifikan di berbagai belahan dunia. Perubahan Iklim adalah suatu keadaan berubahnya suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban sebagai akibat dari

¹ Pemanasan Global atau *Global Warming* merupakan suatu fenomena meningkatnya temperatur bumi secara global yang menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap masa depan bumi termasuk manusia dan makhluk hidup lain. (lihat Ali Hanapiyah Muhi, *Praktek Lingkungan Hidup: Pemanasan Global (Global Warming)*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, 2011)

² Efek Rumah Kaca ialah suatu fenomena menghangatnya bumi karena radiasi sinar matahari dari permukaan bumi dipantulkan kembali ke angkasa dan terperangkap oleh "selimut" yang terdiri dari gas-gas, seperti karbondioksida, metana, nitrogen dioksida, perfluorokarbon, hidrofluorokarbon dan sulfurheksafluorida.

pemanasan global, yang ditandai dengan adanya fenomena perubahan cuaca yang tidak stabil.³ Dampak dari perubahan iklim diantaranya, mencairnya tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang berkepanjangan, banjir, dll.⁴ Kesadaran akan pelestarian lingkungan maupun upaya penyelamatan lingkungan sangat dibutuhkan, mengingat dunia sedang dihadapkan pada bahaya krisis sumber daya alam yang akan terjadi secara bertahap. Hal-hal tersebut semakin menyadarkan warga dunia bahwa dampak yang ditimbulkan atas kerusakan terhadap lingkungan berpotensi besar mengancam kehidupan dimasa yang akan datang.

Fenomena Pemanasan Global dan Perubahan Iklim semakin terlihat jelas seiring dengan adanya Fenomena Globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia. Globalisasi membawa dunia pada peningkatan kegiatan dalam bidang industri. Industrialisasi menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan hidup terkait dengan dampak limbah yang dihasilkannya. Disamping itu, menjamurnya industri diseluruh penjuru dunia meningkatkan kemungkinan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan. Isu mengenai lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai aktor, seperti negara, para pengusaha, dan warga masyarakat diseluruh dunia. Setiap aktor tersebut harus bekerja sama dalam menanggulangi kerusakan lingkungan agar tidak semakin memburuk dan berdampak pada berbagai sektor oleh semua pihak.

³ Fithria Edhi, "Perubahan Iklim: Pemanasan Global dan Efek Rumah Kaca", <http://www.sumatrarainforest.org/index.php/en/component/content/article/35-article/58-perubahan-iklim-pemanasan-global-dan-efek-rumah-kaca>, diakses pada tanggal 31 September 2011, pukul 17:02 WIB

⁴ Green Peace. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/perubahan-iklim-global/>, diakses pada 1 Oktober 2011, pukul 13:05 WIB.

Komitmen internasional mengenai perubahan iklim dimulai dengan diadakannya KTT Bumi atau *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. KTT Bumi membahas mengenai lingkungan dan pembangunan (*United Nation Conference on Environmental Development/UNED*), dengan menekankan pentingnya semangat kebersamaan guna mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat adanya ketidakselarasan dalam melaksanakan pembangunan serta upaya dalam melestarikan lingkungan.⁵

Terkait dengan adanya kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dimasa yang akan datang, isu lingkungan hidup menjamur dalam setiap perundingan dan menghasilkan berbagai konferensi maupun kesepakatan yang mendukung upaya memerangi dampak buruk industrialisasi. Protokol Kyoto merupakan sebuah dokumen protokol yang diformulasikan dibawah perjanjian perubahan iklim PBB (*United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC*), berupa kesepakatan internasional agar negara industri dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif sebesar 5,2% selama periode 2008-2012 dari tingkat emisi tahun 1990. Salah satu skema yang mulai diperhitungkan untuk diterapkan adalah skema REDD+.⁶

Konferensi Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim ke-13 (COP 13) pada tahun 2007 di Bali, menghasilkan *Bali Action Plan*. *Bali Action Plan* mengakui

⁵ Kehutanan Dalam Forum Global, http://www.dephut.go.id/Halaman/Bukubuku/2004/KLN/Miles_tone.htm, diakses pada 30 Maret 2012.

⁶ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, http://www.redd-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=83, diakses pada 1 Oktober 2011, pukul 21:15 WIB

pentingnya hutan dalam upaya mengatasi perubahan iklim serta besarnya potensi yang terkandung dalam REDD+.⁷

Hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan memegang peran penting, satunya sebagai pengolah karbon dan penyedia oksigen yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas ketiga di dunia, serta memiliki tingkat keanekaragaman hayati kedua di dunia.⁸ Hutan Hujan tropis adalah hutan dengan pohon-pohon yang tinggi, iklim yang hangat, dan curah hujan yang tinggi. Dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, hutan di Indonesia mengalami pengurangan dari 162 juta ha menjadi 88,17 juta ha pada tahun 2009. Hal tersebut setara dengan sekitar 46,3% dari luas total daratan Indonesia.⁹ Hutan tropis Indonesia yang memiliki peran yang cukup signifikan. Selain menjadi sumber kehidupan ekonomi dan sosial, Hutan Tropis Indonesia juga berperan dalam mengurangi polusi udara dunia.¹⁰ Kerusakan hutan Indonesia secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap perubahan iklim global. Laju kerusakan yang semakin tidak terkontrol akan semakin menimbulkan kerugian bagi Indonesia maupun dunia, yang berujung pada peningkatan ancaman perubahan iklim dan pemanasan global.

Hutan memiliki peran yang sangat signifikan bagi Norwegia. Oleh karena itu, Norwegia mendukung penuh upaya-upaya negara yang memiliki kawasan

⁷ CIFOR, http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_Indonesian.pdf, diakses pada 31 Oktober 2011, pukul 14:10 WIB

⁸ Forest Watch Indonesia, "Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009", 27 Juli 2011, <http://fwi.or.id/?p=306>, diakses pada 1 Oktober 2011, pukul 19:20 WIB

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Irwanto Forester, "Presiden Dedikasi Tiga Tahun Terakhir Untuk Hutan Indonesia", http://irwantoshut.blogspot.com/2011_09_01_archive.html, diakses pada 1 Oktober 2011, pukul 21:40 WIB

hutan hujan tropis besar, seperti Brazil, Indonesia, dan Republik Kongo, untuk menurunkan laju emisinya.¹¹ Selain itu, sebagai negara industri yang termasuk ke dalam Annex 1 pada Protokol Kyoto, Norwegia memiliki kewajiban yang mengikat untuk menurunkan emisi karbon didalam negerinya, terkait dengan penggunaan energi fosil, transportasi, serta industrialisasi yang tinggi.¹²

Pemberian dana hibah oleh Norwegia sejalan dengan gagasan yang muncul dalam kesepakatan COP, untuk mengganti kewajiban penurunan karbon oleh negara maju di dalam negerinya sendiri dengan memberikan hibah kepada negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya hutan untuk mengurangi laju deforestasi maupun kerusakan hutan.¹³ Dalam pertemuan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali pada Desember 2007, Norwegia menyampaikan komitmen pada sektor kehutanan dengan memberikan *pledge* dana sebesar NOK 3 miliar (sekitar US\$ 500 juta) setahun, sebagai upaya dalam mengurangi emisi gas dan penggundulan hutan-hutan di negara berkembang.¹⁴¹⁵

Norwegia memiliki komitmen untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan program-program pengurangan emisi melalui pencegahan kerusakan hutan dan deforestasi¹⁶ Pada tahun 2010, Norwegia menyambut komitmen

¹¹ Diambil dari <http://matoa.org/redd/>. Diakses pada 9 Juli 2012.

¹² Diambil dari <http://www.iesr-indonesia.org/2010/11/1636/>. Diakses pada 12 Oktober 2012.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Diambil dari http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=8534&Itemid=683, diakses pada 8 Agustus 2012.

¹⁵ NOK (*Norwegian Krone*) merupakan mata uang Norwegia.

¹⁶ Deforestasi hutan merupakan penurunan luas hutan secara permanen, dari areal berhutan menjadi areal tidak berhutan sebagai akibat dari aktifitas manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Deforestasi secara kualitas berupa penurunan ekosistem flora dan fauna pada hutan. Deforestasi secara kuantitas berupa penurunan luas hutan.

Presiden Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada pertemuan G20 tahun 2009, untuk mengurangi emisi sebesar 26% dengan usaha nasional pada tahun 2020 dan 41% dengan bantuan internasional.¹⁷ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam hal pendanaan untuk mengurangi deforestasi.¹⁸ Norwegia dan Indonesia menyadari bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah perubahan iklim. Norwegia ingin membantu upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai komitmen sesuai dengan yang Indonesia telah tetapkan sebagai target pengurangan emisi.

Indonesia dan Norwegia telah menandatangani surat niat (*letter of intent / LoI*) pada 26 Mei 2010, untuk menjalin kemitraan dalam menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia dengan komitmen senilai 1 miliar dollar AS.¹⁹ Kemitraan yang dibangun oleh kedua negara merupakan model kerjasama internasional, dimana negara donor akan memberikan kontribusi berdasarkan hasil yang dicapai atau bukan dalam bentuk hibah atau pinjaman.

Kemitraan antara Norwegia dan Indonesia terdiri dari tiga tahap²⁰, diantaranya:

1. Tahap persiapan pada Juli-Desember 2010.

¹⁷ Kompas.com, "Norwegia: Belum Ada Penundaan Berarti", diakses pada 1 Oktober 2011, pukul 21:05 WIB

¹⁸ Jenny Jusuf, "Indonesia-Norwegia Sepakat Kurangi Deforestasi", <http://iklimkarbon.com/2010/05/27/indonesia-norwegia-sepakat-kurangi-deforestasi/>, diakses pada 8 Agustus 2011, pukul 18:40 WIB.

¹⁹ Electronic Media, "Satgas REDD Studi Banding ke Brazil", 28 September 2010, <http://epaspor.com/online/satgas-redd-studi-banding-ke-brazil.html>, diakses pada 1 Oktober 2011, pukul 20:18 WIB

²⁰ Tempo online, "Durian Runtuh Gaya Skandinavia", 14 Juni 2010, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/06/14/EB/mbm.20100614.EB133812.id.html>, Diakses pada 26 Maret 2012, pukul 20:15 WIB.

2. Tahap Transformasi, yang akan dimulai pada Januari 2011 hingga Desember 2013. Pada tahap tersebut, dilakukan pengoperasian lembaga pembiayaan, moratorium izin baru konversi hutan alam primer dan gambut, menyusun database hutan rusak untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi, penegakan hukum penebangan kayu ilegal dan perdagangan kayu ilegal.
3. Tahap verifikasi pengurangan emisi, yang ditargetkan pada Januari 2014. Pada tahap akhir tersebut dilaksanakan moratorium secara nasional dan juga melakukan penghitungan pengurangan emisi untuk dapat mencairkan dana hibah.

I.2 Rumusan Permasalahan

Pemanasan global merupakan salah satu tantangan terbesar yang tengah dihadapi oleh dunia. Perubahan iklim hanya akan dapat teratasi dengan adanya partisipasi seluruh pihak, dengan mempertimbangkan kembali aspek lingkungan hidup dalam berbagai kegiatan. Salah satu upaya dalam mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan mengaktifkan kembali fungsi hutan, guna mengolah dan mengurangi emisi karbon dunia. Hutan Indonesia merupakan hutan sebagai paru-paru dunia, yang memiliki angka degradasi dan deforestasi yang besar. Komitmen yang diutarakan oleh Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan G20 terkait upaya mengurangi emisi karbon, disambut oleh Pemerintah Norwegia. Norwegia memberikan dana hibah terhadap Indonesia yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan konservasi hutan dalam skema REDD+.

Norwegia menjalin kemitraan dengan Indonesia terkait komitmen Norwegia dalam upaya pengurangan emisi oleh negara maju untuk membantu negara berkembang terkait protokol Kyoto.

I.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana bentuk kerjasama pemberian bantuan dana hibah Norwegia kepada Indonesia terkait upaya pengurangan emisi?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejauh mana komitmen Norwegia dalam menghadapi isu global terkait permasalahan lingkungan hidup.
2. Mengetahui hal-hal yang mendasari Norwegia untuk memberikan bantuan berupa dana hibah bagi Indonesia terkait upaya pengurangan emisi.
3. Mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Norwegia dalam mencapai target pengurangan emisi gas karbon dalam program REDD+.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun data dalam studi hubungan internasional yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup.

2. Secara praktis, hasil penerlitan ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

I.6 Tinjauan Pustaka

- a. **Alberto Alesina dan David Dollar, *Who Gives Foreign Aid to Whom and Why*, Journal of Economic Growth, Vol 5, 2000.**

Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai pola alokasi bantuan luar negeri dari berbagai negara donor terhadap negara penerima. Keduanya berpendapat bahwa arah bantuan asing ditentukan oleh adanya pertimbangan politik dan strategis yang lebih mengarah pada kebutuhan ekonomi dan kinerja kebijakan di negara penerima. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan keterkaitan dari faktor negara penerima bantuan yang menjalankan sistem demokrasi di dalam negerinya. Negara yang menerapkan sistem demokratisasi mendapatkan bantuan yang terhitung cepat setelah terjadinya kondisi maupun situasi yang sulit. Beberapa pengamat berpendapat bahwa sebagian besar bantuan luar negeri yang diterima dari negara maju ke negara berkembang terbuang sia-sia dan hanya menimbulkan permasalahan lainnya, seperti meningkatkan konsumsi menjadi tidak lagi produktif (konsumtif), korupsi, pembangunan institusi yang buruk, dll.

b. Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, The University of Chicago Press, 2007.

Bantuan luar negeri yang diberikan oleh suatu negara terhadap negara lain bukanlah tanpa kontroversi. Terdapat berbagai pro kontra terhadap pemberian bantuan. Hal tersebut muncul karena menyorot pada bantuan yang harus disediakan oleh negara pendonor dan juga terkait dengan isu yang muncul sebagai dampak dari bantuan tersebut. Adanya kritik dari pihak-pihak yang berpendapat bahwa bantuan tersebut tidak berjalan secara efektif dan harus dihentikan. Namun disisi lain, ada yang berpendapat bahwa bantuan luar negeri berjalan dengan efektif, dan dapat menjadi lebih efektif dan meluas lagi di masa yang akan datang.

Dari awal kemunculannya, kegiatan pemberian bantuan terhadap negara lain telah semakin menjamur. Bantuan luar negeri pada awalnya diberikan sebagai bantuan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam misi kemanusiaan akibat adanya peperangan, maupun bencana alam. Namun seiring dengan berkembangnya jaman, bantuan luar negeri berkembang sebagai penerapan kepentingan dari suatu negara terhadap negara lain. Tujuan diplomatik dan pembangunan dalam pemberian bantuan luar negeri telah bergeser, diantaranya adalah pemberian bantuan kemanusiaan, perdagangan, budaya. Setelah berakhirnya perang dingin, bantuan juga diberikan dalam rangka mempromosikan paham demokrasi,

peningkatan ekonomi, perubahan sosial, mengatasi permasalahan global, serta mencegah dan mengurangi konflik.

c. Jennifer J. West and Grete K. Hovelsrud, *Climate Change in Northern Norway Toward an Understanding of Socio-Economic Vulnerability of Natural Resource-dependent Sectors and Communities*, CICERO Report, 2008.

Norwegia terhadap lingkungan yang diwujudkan dengan menjalin berbagai kerjasama internasional dengan negara lain terhadap isu-isu terkait. Norwegia memiliki kekhawatiran yang besar terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh Pemanasan Global karena cepat ataupun lambat, langsung maupun secara tidak langsung, Norwegia akan merasakan dampaknya. Sebagai contoh, terjadinya hujan asam di negara lain, namun mengenai Norwegia karena terbawa oleh angin dan gelombang lain menyebabkan Norwegia menaruh simpati pada polusi jarak jauh. Norwegia menyadari bahwa pemanasan global memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sektor-sektor sensitif dalam negerinya, diantaranya mempengaruhi sektor perikanan, agrikultur, infrastruktur, produksi energi, dan pariwisata. Masing-masing sektor tersebut memiliki ketergantungan secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap sumber daya alam.

Kebijakan manajemen lingkungan dan sumber daya merupakan dua dari berbagai hal yang penting dari kebijakan kerjasama luar negeri

dan pembangunan Norwegia. Norwegia memiliki keyakinan bahwa stabilitas dan keamanan negara dapat dicapai dengan adanya dukungan dari kondisi lingkungan yang sehat dan beragam, sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkesinambungan serta bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, kerjasama internasional Norwegia lebih memprioritaskan pada perubahan iklim, zat kimia yang berbahaya, dan keragaman biologi. Area yang menjadi prioritas kerjasama antara Norwegia dengan negara berkembang meliputi sistem produksi yang berkesinambungan, konservasi dan penggunaan keragaman biologi yang berkesinambungan, pengurangan emisi, serta pemeliharaan peninggalan budaya.

I.7 Kerangka Pemikiran

I.7.1 Global Warming

Pemanasan Global (*Global Warming*) merupakan suatu fenomena meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut serta daratan bumi dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrooksida (N₂O), sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi.²¹

Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi dalam peningkatan resiko *Global warming*, diantaranya melibatkan peran manusia sebagai

²¹ Dr. Ir. H. Ali Hanapiah Muhi, MP. *Pemanasan Global (Global warming)*. <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/12/PEMANASAN-GLOBAL.pdf>, diakses pada 21 Januari 2013, pukul 09.34 WIB.

penduduk bumi. Beberapa studi menyatakan bahwa aktivitas manusia merupakan kontributor terbesar bagi terbentuknya gas-gas rumah kaca, seperti emisi yang dihasilkan dari proses industri atau kendaraan bermotor, serta pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan bahan bakar fosil (bahan bakar minyak, batu bara, dan sebagainya) guna menghasilkan energi untuk mensuplai kebutuhan manusia.²² Selain itu, faktor pemicu lainnya adalah emisi karbon akibat deforestasi, yang menyumbang hampir 20 persen.²³ Berkurangnya luas hutan dunia mempengaruhi penyerapan karbondioksida oleh pohon guna diolah kembali menjadi oksigen. Hutan yang awalnya memiliki fungsi sebagai pengolah karbon dan penyedia oksigen tidak lagi bekerja efektif sebagai mana fungsinya.

Hutan merupakan paru-paru dunia. Karbon-karbon yang tidak dapat diolah oleh hutan, lebih lanjut akan terperangkap di atmosfer bumi bersama gas-gas lainnya, dan kemudian membentuk suatu selimut yang menyelimuti bumi. Sebagai akibatnya, energi panas yang dipancarkan oleh matahari dan seharusnya dipantulkan kembali melalui atmosfer tidak dapat terjadi. Sehingga energi panas tersebut terperangkap karena selimut karbon tersebut, dan membahayakan bumi serta atmosfer bumi.

Atmosfer bumi berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi matahari yang membahayakan, namun dengan adanya energi panas yang

²² Dr. Ir. H. Ali Hanapiah Muhi, MP. "Pemanasan Global (*Global warming*)". <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/12/PEMANASAN-GLOBAL.pdf>, diakses pada 21 Januari 2013, pukul 09.34 WIB.

²³ Berry Nahdian Forqan, "Pemanasan Global, Skema Global dan Implikasinya Bagi Indonesia", 24 Agustus 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-lingkungan/682-pemanasan-global-skema-global-dan-implikasinya-bagi-indonesia.html>. Diakses pada 21 Januari 2013, pukul 10.02 WIB.

terselimuti tersebut, atmosfer bumi berpotensi bolong sehingga tidak dapat secara maksimum melindungi bumi. Disamping itu, suhu bumi akan semakin memanas seiring dengan terjadinya proses tersebut, sehingga mempengaruhi iklim di berbagai belahan dunia.

Global Warming tidak hanya berdampak terhadap atmosfer bumi, melainkan juga berdampak terhadap manusia beserta kekayaan hayati bumi. Dampak global warming akan mempengaruhi perubahan iklim yang ekstrim diberbagai belahan bumi sehingga menciptakan lingkungan hidup yang tidak kondusif bagi kehidupan makhluk hidup di masa yang akan datang.

Berbagai upaya kini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terburuk dari fenomena tersebut, diantaranya adalah dengan menggalakkan pelaksanaan kegiatan hemat energi, memulai penanaman lebih banyak pohon, menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan dan dapat di daur ulang, menggunakan model transportasi yang ramah lingkungan, dan mengurangi konsumsi daging.

Pola konsumsi manusia yang mengkonsumsi daging juga tercatat sebagai salah satu sumber emisi. Peningkatan peternakan merupakan salah satu penyebab utama penggundulan hutan. Industri peternakan menghasilkan limbah berupa pelepasan gas berbahaya (amonia) ke udara, yang menyebabkan hujan asam. Oleh karena itu, pola konsumsi daging harus diubah dan dikurangi agar terhindar dari dampak buruk bagi lingkungan hidup.

I.7.2 Konsep Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional diperlukan dalam upaya menerangkan maupun menganalisis perilaku negara dalam lingkup internasional. Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, adalah

*“tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi”.*²⁴

Kepentingan nasional mendorong sebuah negara untuk melakukan interaksi dengan negara lain untuk mensukseskan pemenuhan kebutuhan nasionalnya. Kepentingan nasional suatu negara dapat berefek ganda, yaitu tidak hanya sebagai landasan negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain, melainkan juga dapat menjadi pemisah hubungan negara-negara di dunia. Negara dengan kepentingan yang bertolak belakang tidak jarang menimbulkan konflik dalam hubungan internasional. Salah satu cara mengurangi konflik tersebut adalah dengan menyesuaikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, serta mencari penyelesaian dari permasalahan dengan melakukan upaya-upaya diplomatik.

²⁴ Jack C Plano, Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd, England, 1982, hal 7.

Pada dasarnya, setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan nasional negara merupakan gambaran dari kebutuhan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya. Kepentingan nasional juga merupakan salah satu faktor yang melandasi negara dalam merancang pola interaksi terhadap negara lain dalam bentuk perumusan kebijakan luar negerinya.

Dalam melihat kerjasama yang terjalin antara Norwegia dengan Indonesia, konsep kepentingan nasional digunakan untuk melihat kepentingan internal yang melandasi Norwegia dalam menjalin kerjasama terhadap negara berkembang seperti Indonesia, dalam upaya kerjasama pengurangan emisi dunia.

I.7.3 Diplomasi Lingkungan (Environmental Diplomacy)

Diplomasi memiliki pengertian seni bernegosiasi antar perorangan atau antar negara, dimana diplomasi selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan dan memiliki tujuan atau kepentingan tertentu.²⁵ Diplomasi diartikan sebagai suatu dialog damai yang mencakup interaksi antar unit-unit politik didalamnya. Diplomasi digunakan untuk menyuarakan kepentingan nasional suatu negara dalam berbagai interaksi dengan negara lain maupun dalam suatu forum internasional.²⁶ Berbagai kepentingan

²⁵ Josep P. Widyatmadja, *Kebangsaan dan Globalisasi dalam Diplomasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm 149.

²⁶ K.J. Holsti, *International Politics A Frame Work For Analysis Third edition*, Practice Hall of India, New delhi, 1978, hal.82-83

nasional yang ingin dicapai melalui proses diplomasi membutuhkan upaya negoisasi dan lobby terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Diplomasi lingkungan (*Environmental Diplomacy*) menurut Andreas Pramudianto, ialah :

“ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu lingkungan hidup untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan nasional (atau kepentingan dan keijakan entitas bukan negara) terutama kebijakan politik luar negeri dan politik dlam negeri di bidang lingkungan hidup suatu negara”.²⁷

Diplomasi dilakukan oleh setiap negara di dunia untuk dapat mensukseskan kepentingan nasional yang bersinggungan dengan kepentingan nasional negara lain. Permasalahan mengenai lingkungan hidup kini menyita perhatian banyak negara didunia. Dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup, dibutuhkan tidak hanya parsitipasi oleh negara-negara tertentu, melainkan juga oleh partisipasi seluruh negara sebagai warga dunia untuk bersama-sama menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masa kini maupun masa yang akan datang.

Bargaining dan negosiasi dalam lingkungan hidup diperlukan oleh negara, mengingat adanya kesepakatan internasional agar negara industri dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif sebesar 5,2% selama periode 2008-2012 dari tingkat emisi tahun 1990²⁸. Mengurangi emisi gas bukanlah persoalan yang mudah. Hal tersebut disebabkan oleh

²⁷ Diplomasi Lingkungan, <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/1453/1324>, diakses pada 14 Juli 2011.

²⁸ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, “Perubahan Iklim”, http://www.redd-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=83, diakses pada 1 Oktober 2011, pukul 21:15 WIB

tingginya dana yang harus dikeluarkan oleh suatu negara dalam mengkonservasi hutan maupun berbagai kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Negosiasi yang dilakukan oleh negara lebih mengarah pada upaya untuk saling bahu-membahu dan bekerjasama agar target yang diinginkan dapat tercapai dan menguntungkan bagi masing-masing pihak terkait dengan kepentingan nasionalnya. Krisis lingkungan tidak lepas dari adanya proses politik, sebab kerjasama lingkungan yang terselenggara dibangun atas dasar adanya kepentingan negara dalam isu tersebut.

Kerjasama yang melibatkan negara maupun organisasi lain terkait dengan upaya pelestarian hutan di Indonesia merupakan suatu hal yang dianggap perlu, mengingat hutan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia bagi pemenuhan hidup sehari-hari terkait berbagai fungsi hutan dalam menyediakan oksigen maupun setiap hal yang dibutuhkan dalam proses produksi. Oleh karena itu, keberadaan dan konservasi hutan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab suatu negara maupun manusia dalam wilayah tertentu saja. Selain itu, pelestarian hutan memerlukan waktu yang tidak sedikit dan juga menelan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, peran banyak pihak diperlukan dalam upaya memastikan ketersediaan kebutuhan hidup manusia di masa yang akan datang.

Dalam hal ini, Skema REDD+ merupakan salah satu program yang mencakup negara berkembang dengan negara maju dalam upaya

pengurangan emisi, dimana negara berkembang menerima bantuan luar negeri dari negara maju dalam menjalankan program tersebut.

I.7.4 Bantuan Luar Negeri

Menurut Hans Morgentau dalam artikel yang berjudul *A Political Theory of Foreign Aid*, bantuan luar negeri merupakan kebijakan luar negeri negara maju ke negara berkembang dan miskin.²⁹ Dalam prakteknya, bantuan luar negeri merupakan jalinan konsep-konsep dan proses-proses ekonomi maupun politik. Bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai pemindahan uang, barang, teknologi, maupun bantuan teknis.

Selain itu, secara umum menurut Jack C. Plano dan Ray Olton dalam bukunya yang berjudul *The International Relation Dictionary*, menjelaskan bahwa bantuan luar negeri adalah³⁰ :

“Bantuan ekonomi, sosial, atau militer yang diberikan kepada suatu negara oleh pemerintah negara lainnya atau lembaga internasional yang bertujuan untuk mendukung persekutuan, membangun kembali perekonomian yang rusak karena perang, memajukan pembangunan ekonomi, meraih dukungan ideologis, memperoleh bahan baku strategis, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari bahaya keruntuhan ekonomi atau bencana alam”. (Plano & Olton, 1982 : 110).

Bantuan yang diberikan negara maju ke negara berkembang dibedakan atas 2 jenis, diantaranya³¹ :

²⁹ Hans Morgentau, *A Political Theory of Foreign Aid*, American Political Science Association, Vol 56, hal 301-302

³⁰ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/367/jbptunikompp-gdl-gurmiwakni-18306-3-babii.pdf>, diakses pada 1 Oktober 2011, pukul 21:30 WIB.

1. Hibah, yakni Bantuan luar negeri yang diberikan negara donor ke negara penerima. Negara penerima dana hibah tidak berkewajiban atau untuk mengembalikan atau melunasi bantuan tersebut. Bantuan dana hibah sangat jarang diberikan dan hanya diberikan kepada hal-hal yang terkait dengan bencana alam, pendidikan, lingkungan hidup, demokratisasi, maupun aktivitas khusus lainnya.
2. Pinjaman/hutang (loan) yaitu bentuk bantuan luar negeri yang mewajibkan negara penerima dana untuk mengembalikan atau membayar kembali beserta bunga atas pinjaman tersebut. Bantuan luar negeri dalam bentuk hutang maupun pinjaman diberikan bagi dana pembangunan resmi (*Official Development Fund*), kredit ekspor, dan pinjaman swasta.

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan oleh Norwegia melalui program REDD dapat dilihat sebagai salah satu bentuk bantuan dalam bentuk hibah, dimana Norwegia sebagai negara maju memberikan sejumlah dana kepada negara berkembang, yakni Indonesia, tanpa mengharapkan pengembalian atas bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan dalam skema REDD+ diutamakan untuk mengupayakan berbagai tindakan terkait pengurangan emisi untuk memperbaiki hutan di Indonesia yang mengalami kerusakan yang cukup parah akibat akumulasi dari berbagai aktivitas manusia.

³¹ Didiek J. Rachbini, "Utang, Tanggung Jawab Bank Dunia", *Agrimedia*, vol 7, hal 10.

Terkait dengan Program bantuan luar negeri, Morgenthau membaginya kedalam 6 bagian, diantaranya:

1. *Prestige* (gengsi/kehormatan), yang melatarbelakangi tujuan negara pendonor dalam memberikan bantuan luar negeri antara lain untuk mendapatkan pencitraan yang positif dimata dunia internasional dengan menunjukkan kepemimpinan, ilmu pengetahuan, militer, teknologi, dsb.
2. *Humanitarian Foreign Aid*, merupakan bantuan yang bersifat non-politis yang diberikan oleh suatu negara untuk diberikan pada negara lain ketika negara tersebut menghadapi bencana, seperti bencana alam, kemiskinan yang menyebabkan bencana kelaparan, dsb. Namun disamping itu, bantuan dalam jenis ini juga dapat bersifat politis, apabila negara pendonor memiliki motivasi tertentu dalam memberikan bantuan.
3. *Military Aid*, merupakan bantuan yang diberikan oleh suatu negara terhadap negara lain dalam bidang militer. Sebagai contoh yaitu pemberian bantuan senjata.
4. *Economic*, yaitu bantuan luar negeri yang diberikan untuk membantu negara maupun lembaga-lembaga keuangan dalam menjalankan pembangunan ekonominya. Bantuan dalam jenis ini cenderung membuat ketergantungan oleh negara penerima bantuan, karena bantuan ini lebih bersifat sebagai uang pinjaman yang memiliki jangka waktu serta bunga untuk pengembaliannya.

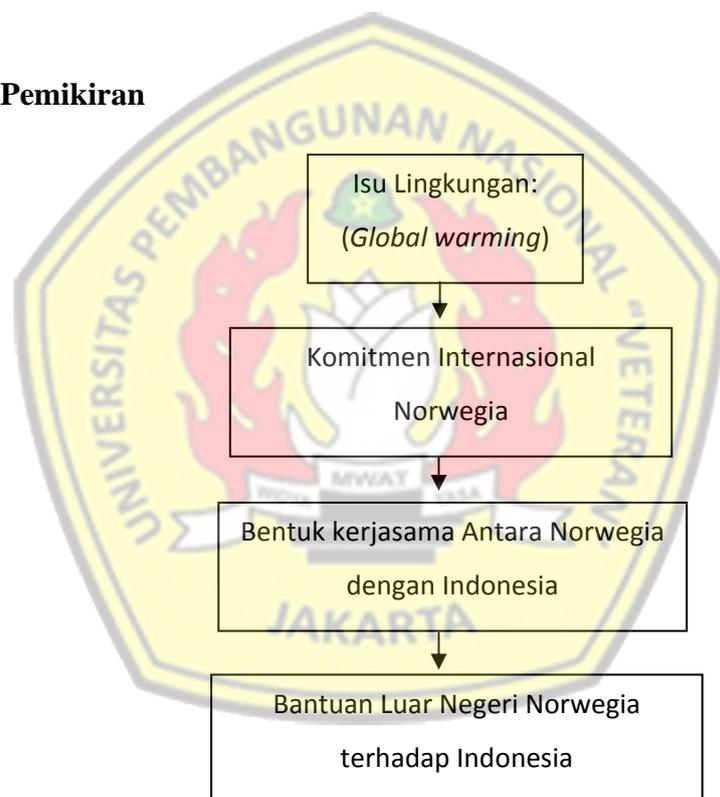
5. *Subsistence*, merupakan bantuan luar negeri yang diberikan guna mencegah kerusakan tatanan serta disintegrasi masyarakat terorganisir.
6. *Bribery* atau Suap, yaitu berupa bantuan yang diberikan oleh negara pendonor guna melancarkan tujuan politiknya terhadap negara penerima bantuan.

Berdasarkan pada berbagai bentuk Bantuan Luar Negeri menurut Morgenthau, penulis akan menggunakan bentuk bantuan secara *prestige* dan ekonomi dalam melihat faktor yang memotivasi negara pendonor dalam memberikan bantuan luar negeri. Kerjasama yang terjalin antara negara maju dengan negara berkembang dapat dikatakan sebagai bantuan dalam bentuk *prestige* atau pencitraan, dimana negara maju akan mendapat *image* sebagai negara yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi oleh negara berkembang, dengan menyepakati komitmen berupa pemberian sejumlah bantuan dalam bentuk dana maupun alih teknologi. Partisipasi yang ditunjukkan oleh negara maju tersebut dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab yang diemban oleh negara tersebut dalam mengurangi emisi dunia.

Dalam hal ekonomi, penulis akan melihat kepentingan dari negara maju dalam memberikan bantuan terhadap negara berkembang. Program REDD+ sebagai salah satu program yang digunakan untuk mengurangi emisi oleh negara maju dan negara berkembang dapat dilihat sebagai salah satu upaya negara maju dalam mengalihkan tanggung jawabnya. Hal

tersebut dikarenakan program REDD+ dilaksanakan di negara berkembang dengan partisipasi dari negara maju dengan pemberian bantuan berupa dana, tenaga ahli, maupun teknologi. Dengan demikian, kegiatan industri di negara maju tidak terpengaruh oleh berbagai upaya pengurangan emisi, dan dapat berjalan dengan tidak mengganggu stabilitas ekonomi negaranya.

I.8 Alur Pemikiran



I.9 Asumsi

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menarik asumsi, bahwa

- Kepentingan Norwegia yang melatarbelakangi pemberian dana hibah terhadap Indonesia berkaitan dengan adanya kepentingan Politik pencitraan maupun kepentingan ekonomi Norwegia.
- Penggunaan skema REDD+ sebagai bentuk kemitraan dalam upaya pengurangan emisi antara Norwegia dengan Indonesia akan lebih didominasi oleh peran Indonesia sebagai negara tujuan penerapan skema.

I.10 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk bantuan sebagai hasil dari kerjasama yang terjalin antara Norwegia dengan Indonesia terkait upaya pengurangan emisi dalam kerangka REDD+.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapat penulis dari berbagai dokumen resmi maupun tidak, yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun institusi terkait. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari hasil penelitian yang diambil dari berbagai hasil penelitian terdahulu, baik yang berupa buku maupun artikel yang berasal dari jurnal ilmiah Hubungan Internasional. Data sekunder penulis peroleh dengan menggunakan metode *internet* dan *Document Research*. Data-data tersebut nantinya akan penulis gunakan untuk mempermudah dan mendukung penelitian.

I.11 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulis untuk memahami isi dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini kedalam 4 bab, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, kerangka konseptual dan kerangka teori, hipotesa, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : KOMITMEN NORWEGIA TERHADAP ISU GLOBAL WARMING

Bab ini akan menjelaskan secara singkat mengenai kondisi dunia saat ini. Berlanjut pada penjelasan mengenai komitmen internasional terkait pemanasan global, respon Norwegia terhadap Global Warming dan Peran Indonesia bagi Norwegia dalam menanggapi Isu Lingkungan.

BAB III : BENTUK KERJASAMA PEMBERIAN DANA HIBAH NORWEGIA TERHADAP INDONESIA DALAM UPAYA PENGURANGAN EMISI

Bab ini akan menjelaskan mengenai kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia terkait upaya pengurangan emisi karbon dunia, dan berlanjut pada penjabaran bentuk bantuan yang diberikan oleh Norwegia kepada Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua Bab.